

Penerapan sanksi hukum terhadap kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal oleh anggota TNI menurut hukum pidana Islam (studi putusan nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025)

M. Rizal, Dina Ariani, Azzahro*

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kepemilikan dan Jual Beli Senjata Api Ilegal Oleh Anggota TNI Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 49-K/PM.I-04/AD/V/2025)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal yang juga melibatkan anggota TNI, yang bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta prinsip hukum pidana Islam dalam menjaga keamanan dan keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*). Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan sanksi terhadap anggota TNI dalam Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi putusan, peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an, hadis, fiqh jinayah, dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 KUHP dengan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, kepastian hukum, ketertiban umum, dan disiplin militer. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta’zir karena tidak diatur secara khusus dalam nash, tetapi menimbulkan kemudharatan dan mengancam keamanan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis putusan tersebut melalui pendekatan jarimah ta’zir dan maqashid al-syari’ah. Penelitian ini terbatas pada satu putusan dan informan terkait proses peradilan sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan.

Kata Kunci: Senjata Api Ilegal, Jarimah Ta’zir, Hukum Pidana Islam, Maqashid al-Syari’ah, Anggota TNI.

ABSTRACT

This research is entitled “The Application of Legal Sanctions for the Possession and Sale of Illegal Firearms by Members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) from the Perspective of Islamic Criminal Law (A Study of Decision Number 49-K/PM.I-04/AD/V/2025).” This research is motivated by criminal acts involving the possession and sale of illegal firearms, including those committed by members of the TNI, which violate Emergency Law Number 12 of 1951 as well as the principles of Islamic criminal law concerning the protection of security and human life (*hifz al-nafs*). This research aims to analyze the judges’ considerations and the application of sanctions against TNI members in Decision Number 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 from the perspective of Islamic criminal law. The research employs empirical legal research using a juridical-empirical approach. Data were obtained through interviews with judges, as well as the study of court decisions, legislation, the Qur’an, hadith, fiqh jinayah, and relevant literature, and were analyzed qualitatively. The results show that the judges rendered their decision based on the fulfillment of the elements of the criminal offense stipulated in Article 1 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 in conjunction with Article 55 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), taking into consideration evidence, witness statements, the defendant’s admission, legal certainty, public order, and military discipline. From the perspective of Islamic criminal law, such conduct falls under the category of jarimah ta’zir, as it is not specifically regulated in the textual sources (*nash*), but causes harm and threatens public security. The novelty of this research lies in its analysis of the decision through the approaches of jarimah ta’zir and maqashid al-shari’ah. This research is limited to a single court decision and informants involved in the judicial process; therefore, its findings cannot be generalized to all similar cases.

Keywords: *Illegal Firearms, Jarimah Ta'zir, Islamic Criminal Law, Maqashid al-Shari'ah, TNI Members.*

Histori Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2026, direvisi: 29 September 2026, disetujui: 01 Oktober 2026, dipublikasikan 05 Oktober 2026

***Penulis Korespondensi:**

azzahroabuyani@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/8vdw7n38>

PENDAHULUAN

Senjata api merupakan benda yang memiliki daya rusak tinggi sehingga penggunaannya tidak dapat dilakukan secara bebas. Kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, penggunaan, maupun jual beli senjata api harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan izin dari pihak yang berwenang. Penguasaan senjata api tanpa hak dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan manusia serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, negara menetapkan aturan yang ketat terhadap kepemilikan dan peredaran senjata api.¹

Indonesia merupakan negara hukum. Setiap orang, termasuk anggota TNI, wajib tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Anggota TNI memiliki kedudukan khusus karena selain sebagai warga negara, mereka juga merupakan bagian dari institusi pertahanan negara yang memiliki tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dengan kedudukan tersebut, anggota TNI dituntut untuk menaati hukum, disiplin, dan norma yang berlaku dalam lingkungan militer.²

Permasalahan menjadi lebih serius ketika senjata api ilegal justru dimiliki atau diperjualbelikan oleh anggota TNI. Perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab seorang prajurit yang seharusnya menjaga keamanan. Salah satu perkara yang menggambarkan persoalan tersebut adalah Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang. Perkara tersebut berkaitan dengan perbuatan tanpa hak terhadap senjata api dan amunisi, termasuk menerima, menguasai, menyimpan, dan memperjualbelikannya tanpa izin.

Dalam hukum positif Indonesia, kepemilikan dan penguasaan senjata api secara ilegal diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) mengatur larangan terhadap berbagai bentuk penguasaan senjata api, amunisi, atau bahan peledak tanpa hak, dengan ancaman pidana yang sangat berat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang peredaran senjata api ilegal sebagai tindak pidana serius karena berpotensi mengancam keamanan masyarakat.

Perkara Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 diperiksa dalam lingkungan peradilan militer karena para terdakwa merupakan anggota TNI. Dalam perkara tersebut terdapat dua terdakwa, yaitu Ahmad Juliansyah dan Riki Saputra. Proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara peradilan militer dengan memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang berkaitan dengan senjata api serta amunisi.³

¹ Aritonang, Yohana Eirene Aprilita, Edi Yunara, & Vita Cita Emia Tarigan. (2025). "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penjualan Amunisi Senjata Api Secara Ilegal yang Dilakukan oleh Anggota Militer Yonif 754/Enk." *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 330–339.

² Darlius, K. (2025). "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan)." *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 330–339.

³ Prasetya Sasela, Joyfel. (2023). "Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil yang Melakukan Tindak Kejahatan." *Lex Administratum*, 13(1), 1–15.

Persoalan tersebut tidak hanya dapat dikaji dari hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan yang menimbulkan kemudaratan dan mengancam keselamatan manusia harus dicegah. Kepemilikan serta jual beli senjata api ilegal tidak secara khusus disebutkan sebagai suatu jarimah dengan bentuk hukuman tertentu dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dapat dikaji melalui konsep *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang penentuan jenis dan kadar sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

Al-Qur'an memberikan prinsip dasar untuk menghindari perbuatan yang dapat membawa manusia kepada kebinasaan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang artinya "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."⁴

Ayat tersebut mengandung prinsip larangan melakukan tindakan yang dapat membawa kepada kebinasaan. Dalam konteks kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal, tindakan tersebut memiliki potensi membahayakan keselamatan manusia dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian, larangan tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*.

Maqashid al-syari'ah menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta, hukum Islam bertujuan menjaga jiwa manusia dari berbagai bentuk ancaman dan kerusakan. Kepemilikan senjata api secara ilegal dapat menciptakan potensi bahaya terhadap jiwa, sehingga pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan.

Konsep *ta'zir* memberikan ruang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan bentuk sanksi terhadap perbuatan yang tidak ditentukan secara khusus hukumannya dalam nash. Penentuan sanksi harus memperhatikan tingkat kesalahan, kemudaratan yang ditimbulkan, kondisi pelaku, serta tujuan pencegahan. Dalam perkara yang dilakukan oleh anggota TNI, aspek tersebut menjadi semakin penting karena perbuatan tidak hanya merugikan kepentingan masyarakat, tetapi juga mencederai disiplin dan kehormatan institusi militer.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tindak pidana kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal. Aritonang mengkaji tindak pidana penjualan amunisi senjata api ilegal yang dilakukan oleh anggota militer dari perspektif hukum positif. Darlius meneliti penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Sementara itu, penelitian Prasetya Sasela berfokus pada sanksi hukum kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil yang melakukan tindak kejahatan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 yang melibatkan anggota TNI sebagai pelaku kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana Islam melalui konsep *jarimah ta'zir* dan *maqashid al-syari'ah*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kajian dan pendekatan analisis yang digunakan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal oleh anggota TNI serta bagaimana penerapan sanksi tersebut apabila ditinjau dari hukum pidana Islam. Penelitian sebelumnya banyak membahas kepemilikan senjata api ilegal secara umum, tetapi penelitian ini secara khusus memusatkan kajian pada Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 dan menghubungkannya dengan konsep *jarimah ta'zir* serta *maqashid al-syari'ah*.

⁴ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

⁵ Hamim, Khairul. (2020). *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal oleh anggota TNI. Pendekatan ini tidak hanya melihat ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga melihat fakta dan pelaksanaan hukum yang ditemukan melalui penelitian lapangan.⁶

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data tersebut berupa uraian dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer I-04 Palembang. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan sanksi hukum, pertimbangan hakim, serta proses pemeriksaan perkara.⁷

Data sekunder diperoleh dari Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, literatur fiqh jinayah, buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengkaji putusan, dokumen perkara, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur hukum yang berkaitan dengan senjata api, hukum pidana militer, dan hukum pidana Islam.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memiliki keterkaitan dengan proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan Militer I-04 Palembang. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, dokumentasi, putusan pengadilan, dan studi kepustakaan dianalisis dengan menghubungkannya pada hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, khususnya konsep *jarimah ta'zir*.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Perkara Kepemilikan dan Jual Beli Senjata Api Ilegal oleh Anggota TNI

Perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang karena para terdakwa merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana menjadi subjek hukum yang diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer.

Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 merupakan perkara pidana khusus mengenai senjata api yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang. Perkara tersebut melibatkan Ahmad Juliansyah dan Riki Saputra sebagai terdakwa. Perkara diperiksa dalam lingkungan peradilan militer karena para terdakwa merupakan anggota TNI yang tunduk terhadap ketentuan hukum militer.⁹

⁶ Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

⁷ Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., & Paminto, S. R. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

⁸ Khalil, Rasyad Hasan. (2020). *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*. Jakarta: Amzah.

⁹ Hadi, Fikri. (2022). "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188.

Perkara tersebut berkaitan dengan aktivitas tanpa hak terhadap senjata api dan amunisi. Perbuatan yang menjadi objek pemeriksaan meliputi menerima, menguasai, menyimpan, serta memperjualbelikan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Perbuatan tersebut kemudian dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana.

Dalam pemeriksaan persidangan, majelis hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan. Pembuktian mencakup keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa senjata api dan amunisi, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan kepemilikan dan transaksi senjata tersebut.

Perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada 25 Juni 2025. Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat perkara tersebut sebagai perkara pidana khusus dengan klasifikasi senjata api.

Kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal merupakan perbuatan yang memiliki tingkat bahaya tinggi. Senjata api yang beredar tanpa pengawasan dan izin dapat digunakan untuk melakukan berbagai tindak pidana serta mengancam keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan yang ketat terhadap senjata api memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam putusan karena menjadi dasar untuk menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa serta jenis sanksi yang diberikan. Dalam perkara ini, pertimbangan hakim dapat dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, dan institusional militer.¹⁰

a. Pertimbangan Yuridis

Secara yuridis, majelis hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 KUHP. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada dasarnya melarang setiap orang tanpa hak untuk memasukkan, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, maupun mengeluarkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak.

Berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur tindak pidana tersebut dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Dengan terpenuhinya unsur tindak pidana, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Kepemilikan dan jual beli senjata api tanpa izin berpotensi membahayakan masyarakat dan menimbulkan keresahan. Senjata api ilegal juga dapat meningkatkan potensi terjadinya tindak kriminal apabila berada di tangan pihak yang tidak berwenang.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya diarahkan kepada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan masyarakat. Pidana diharapkan mampu mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa.¹¹

¹⁰ Maf'ula, Kansa Ahsani. (2020). "Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil." *Jurist-Diction*, 3(1), 207-224.

¹¹ Maswandi. (2025). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi.

c. **Pertimbangan Institusional Militer**

Kedudukan terdakwa sebagai anggota TNI menjadi aspek penting dalam pertimbangan hakim. Seorang prajurit memiliki kewajiban untuk menjaga disiplin, kehormatan, dan nama baik institusi. Perbuatan kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal dinilai dapat mencederai citra dan integritas institusi militer.

Dengan demikian, sanksi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban sebagai warga negara, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan terdakwa sebagai prajurit. Hal tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab yang lebih besar bagi anggota TNI untuk menaati hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.¹²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan institusional militer. Secara yuridis, unsur tindak pidana dinilai telah terpenuhi. Secara sosiologis, perbuatan dinilai dapat membahayakan masyarakat. Sementara secara institusional, perbuatan tersebut dianggap mencederai disiplin, kehormatan, dan integritas prajurit TNI.

3. **Penerapan Sanksi Berdasarkan Hukum Positif**

Dalam Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Ahmad Juliansyah selama 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari dan kepada Terdakwa II Riki Saputra selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari. Perbedaan pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip individualisasi pidana dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, peran masing-masing terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, penjatuhan pidana dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, disiplin militer, dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berpedoman pada ancaman pidana maksimum yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan dasar hukum utama dalam penanganan kepemilikan senjata api tanpa izin. Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana yang sangat berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Dalam perkara Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa. Apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Hal tersebut menunjukkan adanya pertimbangan individualisasi pidana, yaitu hakim tidak semata-mata berpedoman pada ancaman maksimum, tetapi juga mempertimbangkan peran dan keadaan masing-masing terdakwa.¹³

Hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa yang dapat membahayakan masyarakat, berpotensi meningkatkan tindak kriminalitas, dan mencoreng citra institusi TNI. Dengan demikian, penerapan pidana memiliki fungsi perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menjaga disiplin dalam lingkungan militer.

Dari hasil wawancara dengan hakim, salah satu tantangan dalam menangani perkara yang melibatkan anggota militer adalah menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, kepentingan militer, dan rasa keadilan masyarakat. Hakim harus tetap independen dan objektif dalam menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah.

Dengan demikian, penerapan sanksi dalam perkara tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk menegaskan kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera. Penerapan sanksi

¹² Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.

¹³ Muslich, Ahmad Wardi. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

juga berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya peredaran senjata api ilegal.

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kepemilikan dan Jual Beli Senjata Api Ilegal

Hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Salah satu tujuan utama *maqashid al-syari'ah* adalah menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*. Setiap tindakan yang dapat mengancam keselamatan manusia dan menimbulkan kerusakan pada masyarakat harus dicegah.¹⁴

Kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal tidak termasuk dalam kategori hudud maupun qisas-diyat karena tidak terdapat nash Al-Qur'an atau hadis yang secara khusus menetapkan bentuk hukuman terhadap perbuatan tersebut. Namun, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* karena menimbulkan kemudharatan dan mengancam keamanan masyarakat.¹⁵

Ta'zir merupakan bentuk sanksi yang jenis dan kadarnya diserahkan kepada pemerintah atau hakim. Fleksibilitas *ta'zir* memungkinkan hukum pidana Islam memberikan respons terhadap berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak disebutkan secara khusus dalam nash. Dalam menentukan sanksi, hakim dapat mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, tingkat bahaya, serta kemaslahatan masyarakat.¹⁶

Kepemilikan senjata api ilegal dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* karena perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan, mengancam keamanan, dan membahayakan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman yang dianggap mampu mencegah terjadinya kejahatan dan menjaga kemaslahatan umum.

Dalam konteks perkara anggota TNI, penerapan *ta'zir* juga dapat dikaitkan dengan tanggung jawab seorang prajurit untuk menjaga keamanan. Apabila seorang anggota TNI justru terlibat dalam kepemilikan dan jual beli senjata api secara ilegal, maka perbuatannya memiliki tingkat kemudharatan yang lebih besar karena berkaitan dengan profesi dan kedudukannya dalam institusi pertahanan negara.

5. Analisis Berdasarkan *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah bertujuan menjaga lima hal pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perkara kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal, aspek yang paling berkaitan adalah *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa.

Senjata api memiliki potensi untuk digunakan dalam tindakan yang mengancam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembatasan terhadap kepemilikan dan peredarannya merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa dan keamanan masyarakat.

Prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 195 yang melarang manusia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Larangan tersebut memberikan dasar bahwa tindakan yang berpotensi membawa kerusakan dan kebinasaan harus dihindari. Dalam konteks senjata api ilegal, kepemilikan dan peredaran tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan sehingga negara memiliki alasan untuk memberikan sanksi.¹⁷

¹⁴ Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV Amanah.

¹⁵ Wiraguna, Sidi Ahyar. (2024). "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

¹⁶ Nur, Muhammad Tahmid. (2019). "Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." *Sustainability*, 11(1), 1–14.

¹⁷ Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Selain itu, penerapan sanksi terhadap kepemilikan senjata api ilegal juga memiliki tujuan preventif. Hukuman diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta mencegah masyarakat melakukan tindakan serupa. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip *ta'zir* yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.¹⁸

6. Kesesuaian Sanksi dengan Prinsip *Jarimah Ta'zir*

Sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 dapat dipahami sesuai dengan prinsip *jarimah ta'zir*. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya ketentuan nash yang secara khusus menentukan hukuman bagi perbuatan kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal.¹⁹

Dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan ruang untuk menentukan sanksi berdasarkan kondisi pelaku dan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan. Dengan demikian, penjatuhan pidana penjara dalam perkara tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *ta'zir* yang bertujuan memberikan efek jera, mencegah kejahatan, dan menjaga keamanan masyarakat.

Hukum pidana Islam menekankan bahwa penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan keadilan dan proporsionalitas. Hukuman tidak semata-mata ditujukan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pertimbangan hakim yang memperhatikan bahaya kepemilikan senjata api, dampaknya terhadap keamanan masyarakat, serta kedudukan terdakwa sebagai anggota TNI memiliki hubungan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.²⁰

7. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Terdapat titik temu antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menangani kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal. Hukum positif menetapkan larangan dan ancaman pidana melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sementara itu, hukum pidana Islam memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sehingga dapat dikenai *ta'zir*.

Persamaan utama kedua sistem hukum tersebut terletak pada tujuannya, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, tujuan tersebut sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nafs*.²¹

Perbedaannya terletak pada sumber dan mekanisme penentuan sanksi. Hukum positif bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, sedangkan hukum pidana Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan hasil ijtihad. Dalam hukum positif, jenis dan batas pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara dalam *jarimah ta'zir*, terdapat ruang bagi hakim atau penguasa untuk menentukan jenis dan kadar hukuman berdasarkan kemaslahatan.

Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal oleh anggota TNI dapat dipahami memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum pidana Islam

¹⁸ Safriadi, Tgk. (2021). *Maqāshid al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*.

¹⁹ Pengadilan Militer I-04 Palembang. (2025). *Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 tentang Kepemilikan dan Jual Beli Senjata Api Ilegal*.

²⁰ Wahyudi, Weli, Fahmiron, & Neni Vesna Madjid. (2024). "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin." *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(1), 32–38.

²¹ Wijoyo, R. Ach Agus Purno, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, & Reimon Supusepa. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota TNI yang Menjual Amunisi ke KKB Papua terhadap Disparitas Putusan Pengadilan yang Berbeda." *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 239.

selama sanksi tersebut diarahkan untuk mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, mencegah kerusakan, dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 tentang kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal oleh anggota TNI, Penelitian ini hanya berfokus pada Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 sehingga belum dapat menggambarkan keseluruhan praktik penegakan hukum terhadap kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal oleh anggota TNI di Indonesia. dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan institusional militer. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diperiksa dalam persidangan. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan bahwa kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal dapat membahayakan keamanan masyarakat dan menimbulkan keresahan. Dari aspek institusional militer, perbuatan terdakwa dinilai mencederai disiplin, kehormatan, dan integritas prajurit TNI.
2. Sanksi terhadap kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal dalam Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 apabila ditinjau dari hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Perbuatan tersebut tidak termasuk hudud maupun qisas-diyat karena tidak terdapat ketentuan nash yang secara khusus menentukan bentuk dan kadar hukumannya. Namun, perbuatan tersebut mengandung kemudharatan karena dapat mengancam keselamatan jiwa, keamanan masyarakat, ketertiban umum, dan stabilitas negara. Oleh karena itu, penentuan sanksinya dapat diserahkan kepada ulil amri atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Penerapan sanksi tersebut sejalan dengan maqashid al-syari'ah, terutama prinsip hifz al-nafs atau menjaga jiwa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Memerlukan pengembangan kajian yang lebih mendalam mengenai integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam, khususnya dalam kasus-kasus kontemporer seperti kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal. Hal ini penting untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum serta memberikan perspektif alternatif dalam memahami konsep keadilan yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga bernilai moral dan kemaslahatan.
2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam lingkungan peradilan militer, diharapkan agar dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, kemaslahatan, dan efek jera. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dan distribusi senjata api di lingkungan militer guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aritonang, Yohana Eirene Aprilita, Edi Yunara, & Vita Cita Emia Tarigan. (2025). "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penjualan Amunisi Senjata Api Secara Ilegal yang Dilakukan oleh Anggota Militer Yonif 754/Enk." *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 330–339.
- Darlius, K. (2025). "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan)."

- Hadi, Fikri. (2022). "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188.
- Hamim, Khairul. (2020). *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Khalil, Rasyad Hasan. (2020). *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Maf'ula, Kansa Ahsani. (2020). "Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil." *Jurist-Diction*, 3(1), 207–224.
- Maswandi. (2025). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi.
- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV Amanah.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur, Muhammad Tahmid. (2019). "Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." *Sustainability*, 11(1), 1–14.
- Pengadilan Militer I-04 Palembang. (2025). *Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 tentang Kepemilikan dan Jual Beli Senjata Api Ilegal*.
- Prasetia Sasela, Joyfel. (2023). "Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil yang Melakukan Tindak Kejahatan." *Lex Administratum*, 13(1), 1–15.
- Safriadi, Tgk. (2021). *Maqāshid al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., & Paminto, S. R. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahyudi, Weli, Fahmiron, & Neni Vesna Madjid. (2024). "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin." *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(1), 32–38.
- Wijoyo, R. Ach Agus Purno, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, & Reimon Supusepa. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota TNI yang Menjual Amunisi ke KKB Papua terhadap Disparitas Putusan Pengadilan yang Berbeda." *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 239.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. (2024). "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).